KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kritisi Penyerapan Anggaran 2014: DPR Berlakukan Reward dan Pusnishment dalam Pembahasan APBN 2016

Tanggal : Jumat, 03 Juli 2015

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 3

Kritisi Penyerapan Anggaran 2014

DPR Berlakukan Reward and Pusnishment Dalam Pembahasan APBN 2016

SELURUH Fraksi DPR memberikan pandangan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (1/07). Dalam rapat yang dipimpin, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan itu, juru bicara masing-masing fraksi mengkritisi asumsi makro, pendapatan dan belanja negara, serta opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada fraksi yang mengkritisi secara tajam, ada yang sangat kritis dalam aspek moneter, aspek fiskal, atau hasil audit BPK. Ada juga yang mengkiritisi mengenai kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran," ujar Taufik, usai Rapat Paripurna.

Taufik menambahkan, pada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Pemerintah sebelumnya, terdapat aspek hasil audit BPK. Ia meminta, hasil audit itu menjadi bagian tak terpisahkan dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAKL) pada RAPBN 2016.

"Sistem *reward and punishment* harus menjadi salah satu pertimbangan Alat Kelengkapan Dewan dan Badan Anggaran DPR dalam menetapkan APBN 2016. Kita buat suatu mekanisme yang baru antara audit BPK, RKAKL 2016, serta pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya harus satu tarikan nafas. Jangan sendiri-sendiri, seolah tk ada kesinambungan antara hasil auditor negara, dengan pelaksanaan di setiap kementerian atau lembaga," tutur Politisi PAN ini.

Menurut dia, upaya untuk mensinergikan antara aspek auditor negara ini dengan aspek pola bertujuan untuk mempercepat dukungan pada program Pemerintah. Misalnya, kata dia, penyerapan anggarannya sedikit, kemudian hasil auditnya Wajar Dengan Pengecualian. Ini bisa memacu kinerja Kementerian atau Lembaga dalam kaitan mempercepat proses capaian target oleh pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima Pandangan Fraksi dari juru bicara Fraksi Partai Gerindra.

Taufik mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti berbagai hasil temuan BPK. Hasil audit BPK itu akan diserahkan kepada Alat Kelengkapan Dewan DPR. "Kalau hasil audit tidak ditindaklajuti oleh DPR, ini jadi kesalahan DPR," tegas dia.

Sementara sebelumnya, juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Daniel Lumban Tobing menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara efisien, ekonomis, dan transparan. Temuan BPK, lanjut dia, menggambarkan ketidakefisienan penggunaan APBN 2014, diantaranya penyaluran barang atau jasa bersubsidi oleh badan usaha operator melampaui pagu anggaran, serta pengurusan piutang dan penelusuran aset eks BPN belum selesai.

Temuan BPK menunjukan, APBN 2014 belum dikelola secara ekonomis. Dari temuan tersebut, Fraksi PDIP menilai, dalam APBN 2014 masih ditemukan pengelolaan APBN yang belum memenuhi prinsip anggaran yang akuntabel. Karena itu, perlu kejelasan mekanisme reward and pusnishment agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan negara," tutur Daniel dalam sidang paripuna.

Fraksi PDI-Perjuangan, lanjut dia, juga mendesak pemerintah meningkatkan upaya penciptaan tertib dan disiplin anggaran, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan pertangungjawaban. "Semua harus sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara," tegasnya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menilai penyerapan APBN-P Tahun Anggaran 2014 relatif baik dengan prosentase sebesar 94,69 persen. Karena itu, Demokrat meminta pemerintah terus memantapkan proses perencanaan anggaran yang jelas dan terukur, penyederhanaan dokumen pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tepat waktu.

"Mengenai hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2014 yang memberikan opini WDP, fraksi kami meminta pemerintah segera menindaklanjuti temuan tersebut. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta sesuai dengan araturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Seluruh fraksi menyetujui untuk melanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya. Menurut rencana, pada rapat paripurna Jumat (3/7), Pemerintah akan memberikan jawaban terhadap pandangan-pandangan fraksi atas pelaksanaan APBN 2014. ■ TIM